

TAJUK RENCANA

Kenaikan Harga Jelang Ramadan

MENJELANG Ramadan harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, terutama beras dan minyak goreng. Kenaikan harga ini dianggap wajar karena permintaan juga naik, sementara ketersediaan barang terbatas. Komoditas pangan yang paling dicari masyarakat saat ini adalah beras dan minyak goreng. Kedua jenis komoditas itu sangat dibutuhkan masyarakat terutama memasuki Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

Ditinjau dari hukum ekonomi, kenaikan itu terasa wajar, karena antara permintaan dengan ketersediaan barang tidak sebanding. Permintaan tinggi, sedang ketersediaan terbatas. Namun tunggu dulu, kondisi tersebut tetap harus dicermati. Sebagai gambaran, dalam waktu dekat ini akan ada panen raya padi di sejumlah wilayah. Artinya, persediaan beras akan sangat mencukupi.

Logika ekonominya, karena barang berlebih, maka naiknya permintaan tidak akan mempengaruhi harga. Seberapapun permintaannya, asal masih dalam tahap wajar, akan dapat dipenuhi. Terlebih, untuk komoditas beras, pemerintah daerah telah berkoordinasi antarwilayah, misalnya DIY dengan Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi, kita optimis ketersediaan beras akan tercukupi selama Ramadan dan Lebaran.

Andaikan harga naik, secara tak wajar, dipastikan ada yang salah dengan sistem distribusinya. Apalagi, beras sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah akan terus memantau ketersediaan beras dan stabilitas harganya. Bila terjadi kenaikan harga beras, pemerintah daerah akan menggelar operasi pasar untuk mensta-

bilkan harga.

Begitu pula dengan ketersediaan minyak goreng kemasan yang notabene disubsidi pemerintah melalui program Minyakita. Anehnya, tak lama setelah Minyakita diluncurkan, tiba-tiba langka di pasaran. Kalaupun ada harganya sudah tinggi. Padahal pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter, kenyataannya di pasaran bisa mencapai Rp 20 ribu per liter.

Hal semacam inilah yang mestinya ditertibkan, bukan hanya menindak mereka yang menjual di atas HET, melainkan juga melacak mengapa Minyakita langka di pasaran dan jumlahnya terbatas. Di sinilah sebenarnya peran Satgas Pangan, untuk bukan saja menelisik, melainkan juga menindak mereka yang mempermainkan distribusi barang dan harga.

Banyak PR yang harus dikerjakan Satgas Pangan terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri, yakni di saat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan bahan pangan sangat tinggi. Satgas Pangan harus memastikan rantai distribusi barang sudah *on the track*. Bila ditemukan indikasi penimbunan, harus segera diambil tindakan tegas, tak cukup hanya memberi peringatan lisan, karena dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera.

Lebih dari itu, pedagang juga harus memiliki rasa tanggung jawab moral untuk tidak memanfaatkan 'aji mumpung' dengan menaikkan harga demi mendapuk keuntungan berlebih. Sedang di pihak konsumen juga jangan main borong dan *panic buying* karena akan merugikan konsumen lainnya. Di sinilah butuh empati baik pedagang maupun pembeli atau konsumen. □-d

Mahasiswa peserta Kampus Mengajar merupakan mahasiswa paling berani keluar dari zona nyaman. Membantu sekolah untuk proses belajar mengajar yang menyenangkan dan memerdekakan

KATA-KATA Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di atas panggung menarik. Lewat kata-kata itu, ia mengingatkan filosofi perguruan tinggi (PT) laksana menara air. Disebut menara air karena ia memberikan manfaat berupa air bagi sekitarnya. Melalui Kampus Mengajar (KM), PT dapat memberikan manfaat bagi pihak sekolah/satuan pendidikan sembari melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Sejak diluncurkan 2020 lalu, KM merupakan wujud kolaborasi PT, sekolah, dan pemerintah daerah/pemda. Mahasiswa peserta KM berdiskusi dan berkolaborasi untuk kemajuan literasi dan numerasi di tiap-tiap sekolah. Sebagai contoh, peserta KM di SMPN 2 Gamping mengadakan lokakarya penggunaan Aplikasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bagi para guru. Lewat lokakarya itu, kelak literasi dan numerasi para guru meningkat optimal.

Seluruh Indonesia

Tahun ini, terdapat 21.383 mahasiswa peserta KM Angkatan 5 dari 721 PT dan 5.113 sekolah sasaran di seluruh Indonesia (KR, 17/2). Khusus di DIY, terdapat 459 mahasiswa peserta KM Angkatan 5 dan 103 sekolah dasar/SD dan 6 sekolah menengah pertama/SMP sebagai sekolah sasaran. Kita berharap, tingkat literasi dan numerasi para siswa di 103 SD dan 6 SMP di Yogyakarta dapat meningkat optimal pula.

Seiring Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di sekolah, yang ditandai adanya P5, diperlukan desain inovasi kolaborasi KM dan P5. Ada empat syarat dalam desain tersebut. Pertama,

Sudaryanto

kolaborasi KM dan P5 sesuai dengan ciri khas daerah. Misalnya, satuan pendidikan di Imogiri, Bantul dapat mengangkat literasi sejarah-budaya terkait makam-makam Raja Yogyakarta.

Kedua, kolaborasi KM dan P5 mengintegrasikan pembelajaran dan teknologi. Integrasi itu terwujud, salah satunya lewat penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru. Terkait itu, maha-



KR-JOKO SANTOSO

siswa peserta KM dapat membantu para guru yang belum piawai mengakses platform tadi.

Ketiga, kolaborasi KM dan P5 menjunjung prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Para guru dan mahasiswa peserta KM dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar, materi ajar, dan produk ajar siswa. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, para siswa dapat memilih produk ajar berupa antologi cerpen/puisi, proyek kisah daerah, dan pokok literasi.

Keempat, kolaborasi KM dan P5 juga menjunjung prinsip pembelajaran berpusat pada siswa. Lewat pelaksanaan

P5, para guru, mahasiswa peserta KM, dan kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa memiliki keleluasaan dalam berpikir, berdiskusi dengan rekannya, dan berinovasi dalam membuat proyek pembelajaran

Optimal

Keempat syarat di atas, kelak dapat menjadikan inovasi kolaborasi KM dan P5 berjalan optimal. Terkait itu, ada 8 tema P5 yang dapat dipilih. Mulai gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bhinneka tunggal ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan keberkejaan. Mahasiswa peserta KM bersama guru, siswa, dan satuan pendidikan menentukan tema P5 dan rencana proyek dalam satu tahun ajaran.

Di SD, kegiatan P5 dilaksanakan sebanyak 2 hingga 3 kali proyek dalam satu tahun ajaran. Sedangkan di SMP, kegiatan P5 dilaksanakan sebanyak 3 hingga 4 kali proyek dalam satu tahun ajaran. Melalui kolaborasi KM dan P5, kita yakin mahasiswa peserta KM dapat memahami konteks wilayah dan karakteristik siswa. Dan melalui kolaborasi KM dan P5, kita yakin guru, siswa, dan satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya lebih baik. □-d

**) Sudaryanto Mpd, Mahasiswa S-3 UNY, Pengajar PPG Prajabatan UAD, Pengurus Forkom BIPA DIY 2022-2024*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Membangun Kepedulian pada Sampah

KITA menjadi bangsa yang sangat banyak memiliki peringatan hari. Dan beberapa hari lalu, kita baru saja memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Hanya saya belum begitu paham, dengan bagaimana membuat kita peduli pada masalah sampah yang ada. Bahkan sampah teronggok di mana-mana, kadangkala juga belum memunculkan kepedulian kita. Peringatan itu seakan hanya seremonial saja.

Sejatinya, siapa bertanggung jawab pada sampah di luar

rumah? Beberapa waktu lalu saya melewati Kali Mambu Kota Yogya. Di jalan yang tidak terlalu lebar itu, kiri kanan terdapat trotoar kecil mepet tembok-tembok rumah tinggal. Ada yang sudah rusak dan saya melihat di trotoar kecil itu rumput tinggi dan ada juga yang sampah teronggok seakan rumah di dalam pagar tidak berpenghuni. Siapa bertanggung jawab? Pemilik rumah di mana trotoar itu ada atau dinas kebersihan kota? □-d

**) Afi, Tamansiswa Yogyakarta*

Mengagumi 'Kekayaan' Yogya

SAYA sudah hampir 6 tahun ini tinggal di Yogya. Selama 4 tahun kuliah di Yogya dan ditambah 2 tahun bekerja, saya sangat kersan di sini. Lebaran tidak pulang pun, saya merasa betah. Dan dalam keseharian ini, saya benar-benar mengagumi 'kekayaan' Yogya yang luar biasa.

Bukan kekayaan harta. Tetapi luar biasa sekali 'kekayaan' kulin-

er di Yogya. Banyak kuliner langka, bersejarah dan berfilosofi tinggi. Mulai yang terkait zaman Kerajaan Mataram hingga saat ini. Apalagi kalau puasa dan mencari jajanan berbuka di Kaulman, Kotagede juga di Jogokaryan. Banyak sekali makanan dan kisahnya yang beraneka. □-d

**) Anggi, Kilitren Gondokusuman Yogya*

Banalitas Kejahatan dan Martabat Negara

KEKERASAN hampir terjadi setiap hari di negeri ini. Aturan hukum dan Undang-undang 1945, NKRI dan Pancasila seolah-olah tidak dijadikan petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bertindak terhadap sesamanya. Perilaku kekerasan-kekerasan horizontal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan aturan hukum yang telah ada. Intensitas kekerasan yang cukup tinggi di Indonesia, telah menunjukkan bahwa manusia Indonesia telah menegasikan hukum. Menganggap di negara Indonesia bebas melakukan pembantaian dan anarkisme.

Hannah Arendt dalam *Eichmann in Jerusalem : Report in Banality of Evil* (1963), mengungkapkan bagaimana peran negara dan hukum itu mampu mencegah kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Tapi faktanya kekerasan telah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Kekerasan dianggap lumrah, karena negara tidak berfungsi dalam melakukan upaya pencegahan dan penelusuran aktor kekerasan. Ketika negara tidak mampu mengusut pelaku kekerasan secara tegas, maka kekerasan itu akan menular dan siapa pun boleh melakukan kekerasan.

Karena itu, negara harus kuat tanpa tanding. Sehingga dapat memastikan, memaksakan ketaatan para anggota masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang dibuatnya. Negara harus mampu menjaga martabat sebagai negara hukum dan negara harus mampu memberikan rasa aman bagi warganya. Fungsi negara adalah menetapkan aturan-aturan yang mengikat dan menjamin suatu kehidupan bersama. Negara berfungsi untuk menciptakan ruang dan memelihara ketahanan.

Kekerasan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap David itu mem-

Syahrul Kirom

pertontonkan hadirnya *banality of evil*. Kekerasan itu sangat berbahaya jika dibiarkan secara terus menerus. Martabat negara seolah dilecehkan dan tidak memiliki fungsi yang berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pembantaian, kejahatan, anarkisme dan kekerasan seolah tidak mampu dihentikan.

Pertanyaan secara filosofis adalah apakah jalan ke luar agar manusia manusia Indonesia tidak terlibat banalitas kejahatan? Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan manusia dalam berpikir dan menilai secara kritis yang mampu menyelamatkan manusia agar tidak terlibat banalitas kejahatan. Ini dapat diperoleh dengan cara dialog antara 'Aku dan Diriku', sebagaimana dikatakan oleh Hannah Arendt. Manusia-manusia Indonesia harus mampu mencegah sikap sadisme dan kekerasan serta pembantaian manusia dengan sesamanya dengan selalu berpikir kritis dan berdialog dengan dirinya.

Kondisi di Indonesia memperlihatkan para pelaku kekerasan memiliki kedangkalan berpikir dan ketidakmampuan menilai secara kritis. Mereka mengangap pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan pembantaian dengan senjata merupakan hal yang biasa, lumrah dan wajar. Artinya baik aparaturnegara maupun masyarakat sipil dapat terlibat dalam kekerasan dan banalitas kejahatan. Manusia-manusia Indonesia tidak mempunyai hati nurani dan tumpul nalarnya dalam melakukan tindakan kejahatan.

Pelaku kekerasan mengalami ketumpuhan nurani dan ketidakmampuan berpikir tanpa mengikuti aturan hukum dan perintah dari pimpinan. Faktanya pelaku kejahatan sebagai warga negara sudah tidak menghargai adanya 'hukum'. Hukum diterabas oleh tindakan kekerasan tanpa memperhitungkan konsekuensi dari tindakannya. Banalitas kejahatan dapat dilakukan siapa saja, sejauh manusia yang bersangkutan telah kehilangan nurani dan kemampuan berpikir kritis, termasuk oleh kalangan intelektual.

Negara harus berfungsi dan menata kembali aturan hukum untuk menjaga martabat Bangsa Indonesia, jangan sampai banalitas kejahatan yang dilakukan pelaku kekerasan. Ketahanan nasional dan keamanan dalam melindungi warganya ini juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Polri dan TNI. Supaya hukum dari kasus kekerasan fisik anak pejabat harus dapat ditegakkan. Agar martabat negara Indonesia tetap terjaga. □-d

**) Syahrul Kirom Mphil, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

Pojok KR

Pedagang punya tanggung jawab moral.
-- Pembeli juga jangan main borong. ***

Yogya kuatkan zero sampah anorganik.
-- Butuh kesadaran masyarakat. ***

Kemenag ajak pelajar cegah nikah dini.
-- Repotnya kalau sudah telanjur...
Beraba

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung jawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiati.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP